



Analisis Implementasi Kerja Sama Filipina dan Amerika Serikat dalam Penanggulangan Aksi Terorisme di Filipina

Linda Ayu Wardani

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Terrorist acts in the Philippines come from terrorist groups such as MNLF, MILF, JI, NPA, and ASG, who have existed long before the events of 9/11 that hit United States. Not only are they created a number of losses to the Philippines but also to the United States. Military or non-military counter-terrorism cooperation with the United States is one of the Philippines' efforts to overcome the terror of these groups. This study aims to determine the implementation of counter-terrorism cooperation between the Philippines and the United States in dealing with act of terrorism in the Philippines from 2010-2016. This research was analyzed by using the framework of liberalism. This research was done by using qualitative research method with descriptive research type. The results of this study indicate that counter-terrorism cooperation between the Philippines and the United States has been quite successful as evidenced by the approval of military cooperation with the establishment of the JSOTF-P program to train AFP and PNP SAF, then ATA programs to train PNP SAF. In addition, from non-military cooperation, the humanitarian and development assistance from USAID is also used to build Mindanao communities, especially those affected by act of terrorism. However, the cooperation has not completely reduced the high number of terrorist attacks and captured all the most wanted terrorists in the Philippines.

Keywords: *United States, Philippines, counter-terrorism, cooperation, terrorism*

Pendahuluan

Dewasa ini globalisasi membawa banyak perubahan baik positif ataupun negatif. Globalisasi membawa kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi, perubahan sistem politik, sosial, dan ekonomi di seluruh dunia. Akan tetapi, tidak hanya dampak positif saja yang ditimbulkan karena adanya globalisasi, melainkan juga dampak negatif yang dirasakan, seperti mendorong berkembangnya kejahatan transnasional, salah satunya aksi terorisme (Hill, 2005, pp. 47-48)

Aksi terorisme sebagai tindak kejahatan transnasional, hingga saat ini masih menjadi perdebatan banyak kalangan. Hal tersebut karena adanya anggapan dari pelaku atas tindakan yang dilakukannya sebagai upaya perjuangan yang lazim diperjuangkan atas dasar keyakinan/ideologi, sehingga menyebabkan orang-orang yang merasa hak-hak mereka diperjuangkan menganggap pelaku sebagai pejuang. Namun lain pihak, misalnya negara menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan/aksi terorisme (Ganor, 1998, p. 4). Selain itu, aksi terorisme yang terjadi disuatu negara dapat mengancam dan menyebar ke negara lain.

Peristiwa terorisme mulai terkenal sejak 11 September 2001 ketika teroris melakukan pembajakan pesawat jet komersial dan kemudian menabrakan pesawat tersebut

pada gedung World Trade Center (WTC) di New York dan Pentagon, Amerika Serikat. Serangan yang menimbulkan banyak korban tersebut ditengarai oleh kelompok Al-Qaeda (Grunwald, 2001). Sejak adanya peristiwa 9/11 tersebut Amerika Serikat mulai merasa terancam keamanannya dan mendeklarasikan kebijakan Global War on Terror (GWOT) atau perang global melawan terorisme. Global War on Terror (GWOT) merupakan salah satu strategi Amerika Serikat untuk mengurangi aksi ancaman terorisme dengan mengajak dan memberikan bantuan negara-negara untuk bekerja sama dalam upaya kontra terorisme agar mereka meningkatkan kemampuannya (State Department, 2004).

Salah satu negara mitra Amerika Serikat dalam upaya kontra terorisme adalah Filipina. Kebijakan Amerika Serikat terhadap Filipina difokuskan pada kerja sama di bidang keamanan, hal ini karena Amerika Serikat melihat Al-Qaeda telah mempunyai hubungan dengan kelompok teroris internasional lainnya di Asia Tenggara termasuk di Filipina (Felix, 2005). Filipina telah menghadapi aksi terorisme jauh sebelum peristiwa 9/11, yaitu sejak tahun 1970an, namun dari tahun 2010 sampai dengan 2011, insiden terorisme di Filipina tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 205 insiden terorisme, 2011 sebanyak 149 insiden, 2012 ada sejumlah 247 insiden, di tahun 2013 insiden naik menjadi 651 insiden, tahun 2014 sebanyak 597 insiden, kemudian tertinggi di tahun 2015 karena tercatat sebanyak 717 insiden sepanjang tahun tersebut, dan terakhir di tahun 2016 insiden terorisme turun menjadisejumlah 633 kejadian (Global Terrorism Database, 2016, pp. 55-60).

Banyaknya serangan terorisme yang terjadi di Filipina tersebut dipicu salah satunya karena perjuangan bangsa Moro di Mindanao Selatan yang terlibat dalam upaya memisahkan diri dari Filipina untuk membentuk negara Islam otonom. Oleh karena itu mereka ditetapkan sebagai kelompok separatis teroris oleh pemerintah Filipina. Tidak hanya itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga merilis laporan tahun 2008 dan menetapkan beberapa kelompok militan radikal dan separatis yang berada di Kepulauan Sulu dan Pulau Mindanao di antaranya yaitu Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front (MILF), Abu Sayyaf Group (ASG), Jemaah Islamiyah (JI), dan New People's Army (NPA) (Bhattacharji, 2009).

Kelima kelompok terorisme tersebut banyak melakukan aksi-aksi teror dan meresahkan pemerintah serta masyarakat Filipina. Tidak hanya itu, Filipina juga banyak menanggung kerugian atas serangan teror yang dilakukan kelompok-kelompok terorisme tersebut. Kerugian yang dialami Filipina adalah kerugian ekonomi, korban jiwa, serta perubahan psikologis individu atau masyarakat Filipina. Untuk itu, pemerintah Filipina melakukan beberapa upaya kontra terorisme agar mengeliminasi teror yang datang teroris. Upaya yang dilakukan pemerintah Filipina untuk negaranya di antaranya memaksimalkan implementasi undang-undang anti terorisme tahun 2004 dan Human Security Act (HSA) 2007 untuk menghukum teroris, membuat komunitas Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA) atau komunitas masyarakat yang tangguh dalam menghadapi konflik dan melakukan rekonstruksi dan pembangunan di daerah-daerah yang bermasalah, dan membuat Internal Peace and Security Plan (IPSP) yang berguna sebagai pedoman kontra terorisme bagi pasukan keamanan Filipina yaitu Armed Forces Philippines (AFP) dan Philippines National Police Special Action Forces (PNP SAF), serta adanya program deradikalisasi (Banlaoi, 2012).

Selain itu, untuk upaya di lingkup internasional, pemerintah Filipina melakukan kerja sama kontra terorisme dengan Amerika Serikat untuk mengatasi aksi-aksi terorisme yang terjadi di negaranya. Kerja sama kontra terorisme Filipina dan Amerika Serikat penting dilaksanakan, hal ini karena segala aktivitas teroris di Filipina dapat mempengaruhi kondisi domestik baik di Filipina maupun Amerika Serikat. Untuk

mengatasi terorisme di Filipina, Amerika Serikat menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan militer dan non militer (Banlaoi, 2012).

Untuk menganalisis implementasi kerjasama kontra terorisme Filipina dengan Amerika Serikat dalam penanganan aksi terorisme di Filipina dapat menggunakan perspektif Liberalisme yang berfokus pada kebebasan, kerjasama, perdamaian, kemajuan, dan juga pemikiran dari tokoh liberal yaitu Paul Wilkinson tentang penggunaan unsur militer dan penegakkan hukum untuk mengatasi aksi teror yang datang dari kelompok terorisme.

Pembahasan

Implementasi kerja sama kontra terorisme baik militer atau non militer yang dilakukan Amerika Serikat untuk Filipina yaitu dengan menerapkan program-program yang sudah dibentuk, seperti Joint Special Operation Task Forces Philippines (JSOTFP) untuk melatih AFP dan PNP SAF, Anti Terrorism Assistance Program (ATA) untuk melatih PNP SAF, dan program non militer dari USAID untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi daerah-daerah di Filipina yang terkena dampak terorisme.

JSOTF-P dalam melatih AFP dan PNP SAF

JSOTF-P merupakan program hasil kesepakatan pemerintah Filipina dan salah satu upaya Amerika Serikat dalam memperluas GWOT di Filipina. JSOTF-P terdiri dari 500-600 personil yang diambil dari pasukan khusus angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan sejumlah personil pendukung dari ke empat militer Amerika Serikat tersebut. JSOTF-P menciptakan koordinasi antara AFP dan PNP SAF dalam menciptakan keamanan di Filipina. Selain itu, JSOTF-P bertugas memberikan saran kepada AFP dan PNP SAF yang berada di pangkalan, atau pos-pos di hutan, desa, dan perkotaan. Dalam hal ini JSOTF-P melakukan pelatihan untuk operasi intelijen, berbagi informasi sipil atau militer, evakuasi korban dan logistik. JSOTF-P dalam rencana operasinya akan dimulai di Kota Zamboanga, Provinsi Maguindanao, dan Provinsi Sulu untuk menargetkan ASG, JI, MNLF dan MILF (Peter Chalk e. a., 2009, hal. 136).

Pelaksanaan program JSOTF-P dalam melemahkan terorisme di Filipina dari tahun 2010 yaitu pada tahun tersebut JSOTF-P fokus untuk melatih PNP SAF agar memiliki kemampuan sama dengan AFP yang telah mendapatkan pelatihan dari tahun 2001. Hal ini dilakukan untuk menjalankan amanat dari IPSP pemerintahan baru Filipina Benigno Aquino III yang menginginkan pelemahan terorisme di Filipina harus dilakukan oleh dua pasukan keamanan Filipina yaitu AFP dan PNP SAF. Tahun 2011, Kepala urusan publik AFP Kolonel Arnulfo Burgos Jr. melaporkan bahwa kekuatan ASG melemah. Hal ini dibuktikan dari jumlah anggota ASG yang diperkirakan turun menjadi 340 anggota dari yang semula berjumlah sekitar 400 anggota. Angka tersebut didapatkan dari banyaknya operasi tempur yang sering dilakukan oleh kerja sama pihak intelijen dengan lembaga pemerintah, pejabat lokal dan masyarakat (Romero, 2011).

Tahun 2012 sampai dengan 2015, JSOTF-P mempersiapkan segala sesuatu sebelum mengakhiri operasinya di Filipina. JSOTF-P akan melakukan proses transisi dengan menyerahkan kelanjutan kegiatan untuk menciptakan keamanan Filipina kepada otoritas sipil Filipina dan mengurangi personil Amerika Serikat. Namun di tahun 2013, terjadi pemberontakan dari kelompok MILF sehingga JSOTF-P mempersiapkan AFP dan PNP SAF dalam mengatasi pemberontakan tersebut (Linda Robinson d. , 2016, hal. 92-93). Di tahun berikutnya yaitu 2014, AFP dan PNP SAF berhasil menangkap salah satu pemimpin kunci dari kelompok ASG yaitu Khair Mundos yang sedang berada di

Paranaque. Mundos merupakan anggota ASG yang masuk dalam daftar teroris paling dicari oleh Amerika Serikat berkat arahan dari JSOTF-P (Cupin, 2014).

Kemudian, pada tahun 2015 sebelum menyiapkan penutupan programnya di Filipina, JSOTF-P berhasil mengarahkan AFP dan PNP SAF dalam menangkap Marwan dan Basit Usman. Keduanya merupakan anggota teroris yang paling dicari oleh pemerintah Amerika Serikat karena keterlibatannya dalam kelompok JI yang melancarkan pengeboman salah satunya pada tahun 2002 di Bali dan merenggut 202 nyawa. Pada operasi kali ini AFP dan PNP berhasil menangkap target meski harus terlibat baku tembak dengan kelompok MILF yang berusaha melindungi Marwan di wilayah Mamasapano (Balana, 2015). Pada tanggal 24 Februari 2015 JSOTF-P dinonaktifkan dan diganti dengan satuan tugas yang lebih kecil yang dikenal dengan Forward Liaison Element (FLE). Kemudian untuk melengkapi dibentuk juga Liaison and Coordinating Elements (LCEs) agar dapat memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antara AFP dan tim pasukan operasi khusus Amerika Serikat dalam melakukan upaya kontra terorisme (Cabahug, 2015, hal. 19).

ATA dalam Melatih PNP SAF

ATA merupakan salah satu bantuan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dapat mendukung upaya kontra terorisme. ATA memberikan pelatihan dan peralatan kepada Pemerintah Filipina khususnya kepada kepolisian (PNP SAF) untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mencegah, menghalangi, melawan dan menyelidiki aktivitas teroris. Program ATA baik pelatihan atau hibah peralatan disesuaikan dengan kebutuhan negara anggota. Pelatihan ATA kepada PNP SAF dari tahun 2010-2016 banyak berfokus pada bidang *terrorism cyber*. Pada tahun 2010, ATA di Filipina melakukan sosialisasi tentang keamanan *cyber* kepada anggota PNP SAF dalam Konferensi Tiga Perbatasan di Manila. Selain sosialisasi, ATA juga memfasilitasi PNP SAF dengan ahli Teknologi Informasi (TI) untuk mendampingi melakukan pemeriksaan forensik terhadap *flash drive* yang disita dari anggota kelompok MILF dan JI. Dari pendampingan ahli TI ATA, petugas PNP SAF berhasil membuat salinan forensik semua data termasuk file yang dihapus untuk kemudian dianalisis (US Department of State, 2010, hal. 6).

Pada tahun 2011, ATA memperpanjang pelatihan pencegahan *cyber terrorism* dan mendampingi PNP SAF mengumpulkan bukti serangan dari MILF/JI berupa senjata-senjata yang mereka pakai. ATA mendirikan laboratorium pelatihan *cyber* modern di Kamp Crame, Kota Quezon untuk mendukung pelatihan teknis PNP SAF. Pada tahun 2012 PNP SAF mendapat sumbangan peralatan *cyber forensic* senilai 10 juta peso dari Mr. Ed Schlacter Manajer ATA di Filipina. Sumbangan terdiri perangkat lunak, perangkat keras dan perlengkapan digital lain yang dapat menunjang PNP SAF (Anti CyberCrime Group, 2012).

Tahun 2013, PNP SAF telah berhasil memperbarui divisi *cyber terrorism*. Selain sering mendukung upaya memberantas terorisme siber, ATA juga berperan dalam upaya penegakan hukum di Filipina. Sebagai contoh pada bulan September 2013, ATA melatih unit pasukan peledak bom dari PNP SAF di kota Zamboanga untuk memulihkan situasi dan pasca pertempuran antara pasukan pemerintah dan MNLF. Unit PNP SAF menggunakan peralatan yang dihibahkan ATA untuk menjinakkan persenjataan yang disita dari MNLF seperti granat, senapan, amunisi, dan mortir, 46 di antaranya telah dijinakkan oleh teknisi bom dari PNP SAF (U.S. Department of State, 2016, hal. 18-19)..

Tahun 2014, unit PNP SAF dari Kelompok Anti Kejahatan Siber mengidentifikasi tersangka teroris Abu Rami salah satu anggota dari ASG yang melakukan penculikan dua warna negara Jerman, yaitu Dr. Stefan Okonek dan Henrike Dielen yang disandera di pulau terpencil Jolo. Tanggal 10 November 2015, PNP SAF menerima sebanyak 32

peralatan sejenis bahan peledak dan perlengkapan perang serta enam truk *pick up food ranger* dari ATA. Dan di tahun 2016, ATA melatih tim penjinak bom dari PNP SAF mengatasi serangan teroris di sebuah rumah di Kota Butuan, Mindanao, Filipina. Para petugas PNP SAF menangkap tiga tersangka anggota NPA yaitu Roldan Bunggolto, Danilo Acania, dan Jake Borja (U.S. Department of State, 2017).

USAID dalam Bantuan Kemanusiaan dan Pembangunan Bagi Wilayah yang Terkena Dampak Terorisme

Sebagaimana telah diketahui salah satu tujuan USAID di Filipina berfokus pada bantuan untuk wilayah yang terkena konflik seperti wilayah di kepulauan Mindanao. Salah satu upaya USAID untuk membantu Mindanao diwujudkan dengan program yang dinamakan Growth with Equity in Mindanao (GEM). Program ini mempunyai tiga tujuan yaitu: untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Mindanao, untuk memastikan banyak pihak yang berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dan mendapatkan keuntungan dari adanya pertumbuhan, dan untuk membantu mewujudkan dan mengkonsolidasikan perdamaian di Mindanao (USAID, 2012, hal. 2).

USAID melalui program pertumbuhan Mindanao (GEM) telah memberikan bantuan sebesar \$ 98.900.000 dan menghasilkan banyak perubahan di Mindanao. Perubahan tersebut di antaranya program GEM dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Mindanao. Pembangunan infrastruktur seperti sistem air, tenaga surya, pelabuhan, jembatan, pusat perdagangan, dan jalan raya di Mindanao yang direncanakan melalui Barangay Infrastructure Project (BIP). Di bawah GEM sebanyak 760 proyek infrastruktur di daerah Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) dan conflict affected areas of Mindanao (CAAM) dapat diselesaikan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan USAID melalui program GEM sangat berguna bagi penduduk Mindanao yang sebelumnya terisolasi konflik dan minim fasilitas seperti transportasi, dapat menjadi lebih mudah mendapatkan akses. Penduduk lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan berkat ditingkatkannya pembangunan-pembangunan jalan raya dan jembatan. Tidak hanya itu, tersedianya akses jalan juga meningkatkan pengiriman barang-barang dari pusat, serta memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan perjalanan ke daerah-daerah terpencil di Mindanao (USAID, 2014, hal. 8).

Kedua, program GEM dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis di Mindanao. Program GEM telah mendorong kemampuan bisnis produsen untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di Mindanao dengan cara menaikkan pengiriman domestik pada sektor perkebunan di Mindanao. Sektor perkebunan dan pertanian dapat diandalkan di Mindanao. Oleh karena itu GEM berupaya mendorong Mindanao meningkatkan pengiriman ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak hanya itu GEM juga mendorong ekspor makanan laut di Mindanao. Pada bidang pertanian dan perkebunan GEM membentuk Proyek perluasan komoditas. Di bawah GEM proyek ini berhasil meningkatkan pengiriman buah-buahan terbaik dari Mindanao sebesar 360 persen dan pengiriman sayuran terbaik sebanyak 314 persen. Melalui Proyek perluasan komoditas sebanyak 480 konferensi dan lokakarya terkait komoditas digelar dan dapat menguntungkan kurang lebih 27.600 petani kecil, teknisi agro, dan peserta lainnya. Sebanyak 57 kelompok petani juga mendapatkan peralatan produksi dan bibit untuk pertanian mereka (USAID, 2014, hal. 5).

Ketiga, GEM membantu persiapan tenaga kerja dari Mindanao. Dalam upaya meningkatkan tenaga kerja di Mindanao, GEM membantu siswa dalam proyek Computer Literacy and Internet Connection (CLIC) yang berasal dari sekolah di ARMM dan CAAM agar mendapatkan keterampilan komputer yang memadai. Melalui proyek CLIC ini GEM dapat membantu sebanyak 265 sekolah lain di daerah yang terkena dampak konflik,

sehingga total sebanyak 933 sekolah yang dibantu di bawah proyek CLIC. Dari 933 sekolah tersebut tercatat kurang lebih 900.000 siswa dan sekitar 5000 guru yang mendapatkan pelatihan komputer dari CLIC. Dalam pelatihan siswa dan guru, CLIC bekerja sama dengan perusahaan Intel, Microsoft, dan perusahaan komputer lain (USAID, 2014, hal. 6).

Terakhir, GEM memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya perdamaian di Mindanao. Bantuan kemanusiaan yang diberikan GEM adalah kepada warga Zamboanga yang kehilangan tempat tinggal akibat adanya konflik bersenjata antara MNLF dengan pasukan pemerintah Filipina pada bulan September 2013. Bantuan kemudian diberikan oleh kedutaan besar Amerika Serikat sebesar \$ 628.000 sebagai respon atas permintaan kerja sama pemberian bantuan dari Departemen Kesejahteraan Sosial-Pembangunan dan Departemen Kesehatan Filipina. USAID melalui program GEM memberikan bantuan kepada kurang lebih 68.000 pengungsi dengan mengirimkan air minum, 26.000 selimut, 27.300 alas tidur, perlengkapan mandi, makanan, persediaan dapur, dan lembaran terpal untuk kamp penampungan. Bantuan tersebut disampaikan oleh AFP, PNP, dan pemerintah kota Zamboanga dari Departemen Kesejahteraan Sosial-Pembangunan (USAID, 2012, hal. 52). Selain itu USAID juga mendukung upaya perdamaian melalui program reintegrasi mantan kombatan MNLF yang menjadi salah satu kegiatan dari GEM. Mantan kombatan MNLF diberikan pelatihan dan kesempatan kerja di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan bidang lain di wilayah Mindanao. GEM melatih mantan kombatan dan anggota keluarga mereka agar menguasai teknik penanaman, pasca panen dan pemasaran yang lebih baik, dan menghubungkan mereka dengan pasar lain, termasuk sektor ekspor. Dengan adanya pelatihan yang diberikan, para mantan kombatan mampu menghasilkan komoditas bernilai tinggi termasuk sayuran, ikan kerapu dan abalon yang dikirim ke Manila dan berbagai pasar Asia (USAID, 2012, hal. 53).

Kerja Sama Kontra Terorisme Filipina dan Amerika Serikat berdasarkan Perspektif Liberalisme

Perspektif liberalisme melihat terorisme sebagai tindakan-tindakan merugikan dari kelompok teroris yang tidak mendukung hubungan internasional. Tindakan tersebut termasuk pengeboman, pembunuhan, pembajakan, penculikan atau tindakan teror lain yang jauh dari agenda-agenda liberalisme seperti perdamaian, pertumbuhan ekonomi atau kerja sama keamanan. Teroris berupaya mendapatkan tujuan politik yang diwakili oleh kelompok mereka. Menurut liberalisme, teroris adalah penjahat internasional yang melakukan aksi kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan kriminal terhadap penduduk sipil (Wilkinson, 2006, hal. 49). Karena terorisme dipandang sebagai permasalahan kriminal yang mengganggu *public order*, sehingga untuk penyelesaiannya harus ditangani melalui penegakkan hukum (Fiala, 2002). Solusi yang ditawarkan liberalisme dengan melakukan penegakkan hukum merupakan sebagai bagian dari upaya kontra terorisme yang dapat dilakukan dengan mengandalkan instrumen hukum seperti undang-undang anti terorisme. Sebagaimana yang dilakukan Filipina dengan menggunakan undang-undang Anti Terrorism Act 2004 dan Human Security Act 2007 untuk menghukum teroris.

Selain itu, Upaya Amerika Serikat dalam memberikan bantuan program militer melalui JSOTF-P dan ATA sesuai dengan pemikiran tokoh liberalisme Wilkinson yang memaparkan bahwa dalam kerja sama kontra terorisme memungkinkan dimasukkannya unsur militer dalam bentuk *military aid to civil power* bukan dalam bentuk *fully-militarised response* (Wilkinson, 2006, hal. 70). JSOTF-P di Filipina merupakan pasukan militer khusus Amerika Serikat yang tugasnya melatih pasukan Filipina yaitu AFP serta PNP SAF. JSOTF-P tidak mengatasi terorisme secara langsung namun berusaha mengarahkan dan

membantu AFP dan PNP SAF dalam melakukan operasi terhadap terorisme. Sehingga JSOTF-P termasuk dalam kategori *military aid to civil power*. Sementara untuk program AS yang non militer dari USAID berupa bantuan kemanusiaan merupakan strategi jangka panjang yang bertujuan mempromosikan nilai – nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang akan berguna dalam mengeliminasi akar penyebab teror itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan paradigma liberal, bahwa cara yang ideal untuk mengatasi teror harus dilakukan tanpa pemaksaan dan kekerasan (Wilkinson, 2006, hal. 70).

Kesimpulan

Hasil kerja sama kontra terorisme Filipina dengan Amerika Serikat dalam menangani aksi terorisme di Filipina, yaitu terbentuk program militer JSOTF-P untuk melatih AFP dan PNP SAF dalam melakukan kontra terorisme dan ATA untuk melatih dan memberikan dukungan kepada PNP SAF. Serta program non militer bantuan kemanusiaan dan pembangunan dari USAID untuk membantu masyarakat Mindanao yang terkena dampak terorisme.

Implementasi dari pelatihan khusus tim JSOTF-P kepada AFP dan PNP SAF, adalah melalui pelatihan operasi intelijen, berbagi informasi sipil atau militer, evakuasi korban dan logistik. Sementara untuk program ATA dalam melatih PNP SAF banyak berfokus pada pelatihan dan pemberian dukungan peralatan untuk mencegah terorisme siber di Filipina. Untuk program bantuan kemanusiaan dan pembangunan yang diberikan USAID berfokus pada masyarakat di wilayah yang terkena dampak terorisme. Salah satu upaya USAID untuk membantu Mindanao diwujudkan dengan program yang dinamakan Growth with Equity in Mindanao (GEM). USAID telah memberikan bantuan sebesar \$ 98.900.000 yang mencakup proyek dan kegiatan di berbagai bidang teknis, termasuk: pembangunan infrastruktur, pembangunan dan pertumbuhan bisnis, mempersiapkan tenaga kerja dan bantuan kemanusiaan untuk mendukung perdamaian dengan melakukan reintegrasi mantan kombatan.

Kerja sama kontra terorisme yang dijalin Filipina dan Amerika Serikat merupakan salah satu cara untuk menghapus situasi anarki yang terjadi di lingkungan domestik suatu negara maupun lingkungan internasional. Dalam konteks negara Filipina, lingkungan anarki disebabkan oleh kelompok-kelompok terorisme seperti MRLF, MILF, NPA, JI, dan ASG yang sudah lama melancarkan teror di negara tersebut. Upaya Filipina untuk mengatasi teror dari kelompok-kelompok tersebut dilakukan dengan penegakkan hukum. Baik dengan mengerahkan pasukan keamanan atau dengan membuat undang - undang anti terorisme tahun 2004, dan Human Security Act (HSA) tahun 2007, serta kebijakan keamanan nasional (IPSP 2011-2016). Namun, upaya tersebut dirasa belum cukup efektif mengurangi ancaman dari terorisme. Oleh karena itu ditempuhlah upaya kerja sama kontra terorisme dengan Amerika Serikat baik dari segi militer maupun non militer.

Kerja sama kontra terorisme antara Filipina dan Amerika Serikat dalam menangani terorisme di Filipina dari tahun 2010-2016 dinilai cukup berhasil, meskipun tidak dapat menghilangkan serangan – serangan teror secara signifikan dan menangkap semua teroris yang paling dicari dalam jangka pendek. Namun, setidaknya hasil dari implementasi kerja sama kontra terorisme tersebut cukup berhasil baik dalam meningkatkan kemampuan kapasitas pasukan keamanan Filipina, mengatasi beberapa aksi-aksi teror dan menangkap teroris yang datang dari kelompok MRLF, MILF, NPA, JI, dan ASG, ataupun membangun kembali masyarakat Mindanao yang terkena dampak terorisme tersebut.

Referensi

- Anti CyberCrime Group. (2012). *Cyber Forensic Equipment Grant From US-ATAP*. Dipetik April 4, 2018, dari <https://pnpacg.ph/main/21-central-office/45-cyber-forensic-equipment-grant-from-us-atap>
- Balana, C. D. (2015). *AFP, PNP forces launch joint operation to capture Usman*. Dipetik April 3, 2018, dari <http://newsinfo.inquirer.net/671745/afp-pnp-forces-launch-joint-operation-to-capture-usman>
- Banlaoi, R. C. (2012). Current Terrorist Groups and Emerging Extremist Armed Movements in the Southern Philippines. *Threats To Philippine National Security*, hal. 168-169.
- Bhattacharji, P. (2009). *Terrorism Havens: Philippines*. Council on Foreign Relations.
- Cabahug, S. D. (2015). *Joint Combined Exchange Training Evaluation Framework: A Crucial Tool In Security Cooperation Assessment*. Naval Postgraduate School, Monterey.
- Cupin, B. (2014). *Abu Sayyaf leader in US terror list arrested*. Dipetik April 4, 2018, dari <https://www.rappler.com/nation/60290-abu-sayyaf-leader-arrested>
- Felix, V. A. (2005). *Philippine - US Security Relations: Challenges and Opportunities After the 9/11*. USAWC Strategy Research Project.
- Fiala, A. (2002). *Terrorism and the Philosophy of History: Liberalism, Realism, and the Supreme Emergency Exemption*. Dipetik Juni 1, 2018, dari <https://commons.pacificu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=eip>
- Global Terrorism Database. (2016). *Terrorist Incidents in Philippines*. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism.
- Grunwald, M. (2001). *Terrorists Hijack 4 Airliners, Destroy World Trade center, Hit Pentagon; Hundreds Dead*. Dipetik Februari 12, 2017, dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2001/09/12/AR2005033107980.html>
- Linda Robinson, d. (2016). *U.S. Special Operations Forces in the Philippines, 2001-2014*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Lowery, W. E. (2010). *Combating Terrorism In The philippines To Improve U.S. Homeland Security*. Monterey, California: Naval Postgraduate School.
- Peter Chalk, e. a. (2009). *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia A Net Assessment*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Romero, A. (2011). *AFP: Abu Sayyaf losing strength*. Dipetik April 3, 2018, dari <https://www.philstar.com/nation/2011/09/20/728539/afp-abu-sayyaf-losing-strength>
- State Department. (2004). *Patterns of Global Terrorism 2003*. Office of the Coordinator for Counterterrorism, U.S. Department of State.
- U.S. Department of State. (2017). *Antiterrorism Assistance Program 2016*. Dipetik April 4, 2018, dari <https://www.state.gov/m/ds/rls/rpt/273872.htm>
- U.S. Depatment of State. (2016). *Antiterrorism Assistance Retrospective 2013-2015*. Washington, D.C.: Bureau of Diplomatic Security.
- US Department of State. (2010). *Antiterrorism Assistance Fiscal Year 2010 in Review*. Washington, D.C.: Bureau of Diplomatic Security.
- USAID. (2012). *Performance Evaluation of USAID/Philippines Growth With Wquity in Mindanao III (GEM-3) Program*. Davao: Davao Office Louis-Berger Group.
- USAID. (2014). *USAID's Growth With Equity In Mindanao Program*. Davao: Louis Berger Group.
- Wilkinson, P. (2006). *Terrorism versus Democracy The Liberal State Response*. New York: Routledge.

